

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan /pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

2. Kedudukan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Kerja Sama Luar Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Pusat Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen kerja sama luar negeri di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan urusan atase pertanian.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Bidang Bilateral
- (2) Bidang Regional
- (3) Bidang Multilateral
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian

Bidang Bilateral memiliki 3 Sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara negara di kawasan Asia dan Pasifik.
2. Sub Bidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Regional memiliki 3 Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
2. Sub Bidang Non ASEAN mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga Non ASEAN.
3. Sub Bidang Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga Intra Kawasan.

Bidang Multilateral memiliki 3 Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Pangan dan Pertanian.
2. Sub Bidang Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program kerja sama luar negeri , serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara Multilateral dengan Organisasi Internasional pemerintah dan non pemerintah.
3. Sub Bidang Administrasi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, evaluasi,dan pelaporan serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan Pusat Kerja Sama Luar Negeri, serta Atase Pertanian.

3. Visi dan Misi

Visi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif.
2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeriyang mendukung Strategi Induk pembangunan pertanian nasional.
3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
4. Meningkatkan peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.

6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima.

4. Tujuan

Tujuan organisasi Pusat Kerja Sama Luar Negeri periode tahun 2015 -2019, sebagai berikut :

1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
4. Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral.
5. Menggali dan memanfaatkan peluang kerja sama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian.
6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

5. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif .
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Strategi Induk* pembangunan pertanian.
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
4. Terwujudnya peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri selama Bulan Januari 2016, dapat dilaporkan sebagai berikut :

2.1. Bidang Bilateral

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) dan Kunjungan ke Beberapa Pusat Penelitian Pertanian, tanggal 14 – 21 Januari 2016 Berlin – Jerman.

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Bilateral

1. Koordinasi Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra tanggal 25-26 Januari 2016 di Jakarta
2. Pembahasan Draft Protokol Persyaratan Ekspor Manggis ke Tiongkok, tanggal 27 Januari 2016 di Kementerian Pertanian Jakarta

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Rapat Persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Singapura tanggal 6 Januari 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
2. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan tahun 2016 tanggal 8 - 9 Januari 2016 di Wisma Kementerian Pertanian Cipayung Bogor
3. Rapat Persiapan Pertemuan The Second Biennial Trade Ministers Forum (BTMF) Indonesia – India, tanggal 13 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan Jakarta.
4. Rapat Koordinasi Pengembangan Kerjasama Bilateral Indonesia – Belanda, tanggal 15 Januari 2016 di Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian Jakarta.

5. Rapat Sub Komite Perdagangan Barang Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pertemuan ke-4 *Joint Committee General Review* IJEPA tanggal 21 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan Jakarta.

2.2. Bidang Regional

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pertemuan Komite The International Tripartite Rubber Council (ITRC) Special Meeting, tanggal 19-22 Januari 2016 di Bangkok – Thailand.

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Regional

1. Rapat Koordinasi Persiapan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan – Selatan tanggal 15 Januari 2016 di Wisma Kementerian Pertanian Cipayung Bogor.
2. Rapat Persiapan The 12th session of the Governing Council of the Centre for Alleviation of Poverty Through Sustainable Agriculture (CAPSA) yang akan diselenggarakan di Bangkok – Thailand pada tanggal 19 Februari 2016, tanggal 11 Januari 2016 di Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian Jakarta.
3. Koordinasi Penyusunan Proposal Kerjasama BIMP EAGA, tanggal 18-20 Januari 2016 di Sulawesi Utara.
4. Rapat Persiapan Strategic Planning Meeting IMT-GT, tanggal 19 Januari 2016 di Pusat KLN Kementerian Pertanian Jakarta
5. Koordinasi Perkembangan Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), tanggal 20-22 Januari 2016 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Monitoring Kelompok Kerja PISAGro, tanggal 21-23 Januari 2015 di Lampung
7. Rapat Lanjutan Persiapan *The 12th Session of the Governing Council of the Centre for Alleviation of Poverty Through Sustainable Agriculture (CAPSA)* yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 19 Februari 2016, tanggal 25 Januari 2015 di Pusat KLN Kementerian Pertanian Jakarta.

8. Rapat persiapan pertemuan *The 7th OIC Ministerial Conference on Food Security and Agricultural Development* dan *The Inaugural General Assembly of Islamic Organization for Food Security (IOFS)* tanggal 25 Januari 2015 di Pusat KLN Kementerian Pertanian Jakarta.
9. Pembahasan kepastian pelaksanaan *High Level Meeting Kyrgyz*, tanggal 26 Januari 2015 di Pusat KLN Kementerian Pertanian Jakarta.
10. Koordinasi Peningkatan Kerjasama ASEAN tanggal 27-29 Januari 2016 di Denpasar – Bali.
11. Pertemuan Direktur CAPSA dengan Kepala Pusat KLN Kementerian Pertanian, tanggal 28 Januari 2016 di Pusat KLN Kementerian Pertanian Jakarta

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri Video Conference Persiapan Pelatihan untuk Palestina, tanggal 14 Januari 2016 di JICA Indonesia, Senayan Jakarta
2. Menghadiri rapat Persiapan Pertemuan Komite ITRC tanggal 19-22 Januari 2016 di Bangkok, tanggal 15 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan Jakarta.
3. Menghadiri rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan KSST 2016, tanggal 18 – 20 Januari 2016 di BB Singosari Malang.
4. Menghadiri rapat Persiapan *The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching 2016*, tanggal 22 Januari 2016 di Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta.
5. Menghadiri rapat Tindak Lanjut Hasil Komite ITRC, tanggal 25 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan Jakarta.
6. Menghadiri Rapat Pembahasan CEAPAD di Jepang, tanggal 27 Januari 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
7. Rapat persiapan *advance team* ke Timor Leste (Inseminasi Buatan), tanggal 28 Januari 2016 di Sekretariat Negara RI Jakarta.

2.3. Bidang Multilateral

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Multilateral

1. Rapat Persiapan OECD Committee on Agriculture tanggal 2-4 Pebruari 2016 dan Meeting of the OECD Committee for Agriculture at Ministerial Level tanggal 7-8 April 2016, tanggal 26 Januari 2016 di Pusat KLN Kementerian Pertanian Jakarta

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Menghadiri Rapat Persiapan bahan *Workshop Regional Initiative to Support the Zero Hunger Challenge in Asia and the Pacific*. Tanggal 5 Januari 2016 di Kementerian Pertanian Jakarta.
2. Menghadiri Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI, tanggal 7 Januari 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
3. Menghadiri Rapat Pembahasan Persiapan Hari Pangan sedunia ke 36 tahun 2016, tanggal 8 Januari 2016 di Badan Litbang Pertanian Jakarta.
4. Menghadiri Rapat Persiapan Pertemuan The 7th International Hybrid Rice Symposium, tanggal 8 Januari 2016 di Badan Litbang Pertanian Jakarta
5. Menghadiri Seminar Nasional Perkembangan Implementasi UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia, tanggal 19 Januari 2016 di Hotel Aryaduta Jakarta.
6. Menghadiri Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah terkait Pembahasan Persiapan Hari Pangan Sedunia ke 36 Tahun 2016, tanggal 20 Januari 2016 di Puri Garden Jawa Tengah.
7. Menghadiri Finalisasi Penyusunan Draft Perpres dan Naskah Urgensi Dalam Rana Ratifikasi HCA Pendirian Country Office IFAD di Indonesia, tanggal 20 Januari 2016 di Badan Fiskal Kementerian Keuangan Jakarta.
8. Menghadiri Rapat Pembahasan Komposisi Panelis Dalam First State terkait Kasus Sengketa DS484, tanggal 21 Januari 2016 di Kementerian Perdagangan.

9. Menghadiri Rapat Terkait Usulan Pendirian Kantor Regional ICCO tanggal 21 Januari 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
10. Menghadiri Pertemuan pendampingan Menerima Misi IECD Economic Survey of Indonesia 2016, tanggal 27 Januari 2016 di PSEKP Bogor.

2.4 Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Penyusunan Finalisasi Tahunan 2015 Pusat KLN Kementerian Pertanian, tanggal 13-14 Januari 2016 di Balai Besar Biogen Bogor
2. Menghadiri Rapat Pembahasan Redistribusi Pegawai Eks Ditjen PPHP, tanggal 12 Januari 2016 di Balai Penelitian Peternakan Bogor
3. Tindak Lanjut Buku Kerja Sama Kementan Dengan Lembaga Donor tanggal 21-23 Januari 2016 di Jawa Barat
4. Pemanfaatan Peluang Kerja Sama Luar Negeri, tanggal 26-28 Januari 2016 di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

5. Penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 59 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 13 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 39 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 4 orang, melakukan kunjungan sebanyak 6 (enam) orang, program S2 sebanyak 1 orang, program S3 sebanyak 2 orang.

LAPORAN BULANAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

PERIODE BULAN JANUARI 2016

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT	KEGIATAN	PIHAL YANG TERLIBAT	HASIL KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
KERJA SAMA BILATERAL					
1.	6 Januari 2016 Kemenlu	Rapat Persiapan Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Singapura	Kementerian Luar Negeri Kemenko Polhukam Kemenko Perekonomian Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Hasil Pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Luar Negeri Singapura akan melakukan kunjungan kerja perkenalan ke Indonesia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 12 Januari 2016 di Jakarta. Pertemuan ini akan membahas isu-isu prioritas antara kedua negara, salah satunya adalah kerja sama bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. 2. Dalam perkembangan kerja sama bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, kedua negara sepakat untuk melakukan revitalisasi kerja sama dari 6 <i>Working Group</i> (WG) yang dikoordinir oleh Kemenko Perekonomian, yaitu WG Batam Bintan Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus (BBK dan KEK); WG Investasi; WG Ketenagakerjaan; WG Perhubungan Udara; WG Turisme; dan WG Agribisnis. 3. Kerja sama bidang pertanian Indonesia – Singapura termasuk dalam WG Agribisnis. Pertemuan terakhir yaitu <i>Agribisnis Working</i> 	

				<p><i>Group</i> (AWG) ke-11 telah dilaksanakan pada tanggal 11-12 Nop 2015 di Makassar. Mempertimbangkan bahwa cukup banyak potensi produk pertanian lainnya selain buah dan sayur untuk diekspor ke Singapura, maka telah disepakati perluasan cakupan kerja sama untuk semua produk pertanian.</p> <p>4. Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah peningkatan ekspor sayuran dan buah Indonesia ke pasar Singapura sebesar 20% per tahun. Namun, sampai saat ini target tersebut belum terpenuhi karena memiliki beberapa kendala, diantaranya masalah <i>logistic cost</i> yang sangat tinggi dan harga jual di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di pasar Singapura.</p> <p>5. Untuk meningkatkan kerja sama bidang pertanian kedua negara, maka diusulkan agar dibentuk perjanjian internasional (MoU) sebagai payung hukum kerja sama tersebut.</p> <p>6. Direncanakan akan dilaksanakan <i>Senior Official Meeting</i> di Bali dan <i>Ministerial Meeting</i> di Singappura untuk melaporkan hasil pertemuan 6 WG diatas, pada minggu ketiga bulan Februari 2016.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.	08-09 Januari 2016 Wisma Kementan	Rapat kordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Selatan-Selatan tahun 2016	Pusat KLN Kemenlu Eseleon I Kementan terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan kerjasama Selatan-selatan tahun 2016. 2. Terkait kerjasama bilateral hal yang dibicarakan adalah terkait pending issues dibidang pertanian dengan Negara-negara Afrika diantaranya; pertemuan Joint Agriculture Consultative Committee (JACC) pertama RI-Afsel yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2015, Joint Working committee on Agriculture (JWC) pertama RI-Afsel yang direncanakan tahun 2015 serta penyelesaian penyaluran hibah traktor tangan ke Ethiopia dan Tanzania serta pelatihan perakitan traktor ke sejumlah penerima bantuan. 3. Pelatihan perakitan dan penggunaan traktor tangan tahap kedua dilaksanakan untuk tiga Negara penerima yaitu Kenya, Tanzania dan Ethiopia. Saat ini hanya Kenya yang telah menerima bantuan tersebut, adapun Tanzania dan Ethiopia belum sampai ke titik bagi karena masih mengalami permasalahan kepabeanan di pelabuhan kedua Negara tersebut. 4. Pelatihan perakitan traktor tangan tahap kedua akan dilaksanakan jika bantuan traktor tangan ke Tanzania dan Ethiopia telah sampai ke titik bagi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan JACC III RI-Tanzania sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2016 di Tanzania, namun karena proses kepabeanan bantuan traktor tangan belum selesai sehingga traktor tangan tersebut belum sampai ke titik bagi di Tanzania, maka Kementan akan meng hold pelaksanaan JACC III hingga permasalahan ini diselesaikan oleh pihak Tanzania. 2. Saat ini Pusat KLN sementara menunggu jawaban konfirmasi dari pihak Namibia untuk waktu kesiapan pihak Namibia terkait pelaksanaan JWC
----	--------------------------------------	--	---	--	---

3.	13 Januari 2016 Kemendag	Rapat Persiapan Pertemuan The Second Biennial Trade Ministers Forum (BTMF) Indonesia - India	Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Obat dan makanan, Badan Standardisasi Nasional, BULOG dan PT. Antam	Terkait isu <i>Ban on Indian Buffalo Meat by Indonesia</i> , masukan dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan peraturan perundangan tentang prosedur pemasukan daging dari luar negeri ke Indonesia, rencana pemasukan daging kerbau ke Indonesia telah melalui tahapan penilaian negara meliputi a) penilaian dokumen, b) verifikasi lapangan, c) kajian analisa resiko yang ditekankan pada sistem pengendalian dan pengawasan penyakit hewan khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta system penjaminan keamanan daging di negara asal. 2. Tahapan penilaian dokumen dan verifikasi lapangan ke India oleh Tim Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan, telah dilaksanakan pada tanggal 28 September – 2 Oktober 2015. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kajian analisa resiko dan hasilnya telah dibahas pada rapat komisi ahli kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan tanggal 14 – 15 Desember 2015 untuk memperoleh rekomendasi keamanan pemasukan daging kerbau dari India dari resiko menularkan PMK ke wilayah	
----	-----------------------------	---	---	---	--

				<p>Indonesia.</p> <p>Terkait dengan isu Impor Gula, Beras dan <i>Skimmed Milk</i> dari India, masukan dari Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkenaan dengan permintaan pihak India untuk mengekspor gula, saat ini Indonesia memiliki total 63 pabrik gula yang tersebar di seluruh wilayah. Namun sebagian besar pabrik gula tersebut berada di Pulau Jawa. Kebutuhan gula pada tahun 2015 sebesar 3.1 Juta Ton. Sedangkan total kebutuhan nasional sebesar 5.7 Ton. Total produksi sebesar 2.7 Ton. Sedangkan produksi yang diharapkan sebesar 3.2 Juta Ton. 2. Saat ini kebutuhan gula rafinasi masih sangat tinggi dan pabrik gula rafinasi masih sangat terbatas. Sudah ada investor yang berminat untuk membangun perusahaan gula rafinasi namun belum terdapat kesepakatan lebih lanjut. Saat ini Indonesia masih membutuhkan bantuan teknologi mulai dari teknologi pengolahan sampai teknologi pasca panen. Selain itu Indonesia masih membutuhkan bantuan mekanisasi pertanian. 3. Mempertimbangkan kondisi diatas, Indonesia membuka peluang kerja sama teknis dengan India. Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi impor untuk <i>Raw</i> 	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>Sugar</i> yang masuk dalam kategori <i>Idle Capacity</i>, sedangkan Kementerian Perdagangan memberikan rekomendasi untuk gula skala industri. Selain itu dijelaskan pula rencana melebur beberapa pabrik gula yang kurang efisien menjadi satu pabrik gula yang lebih produktif. Hal ini membuka peluang investasi dari pihak luar.</p> <p>4. Beras dan gula merupakan komoditas pertanian yang sangat sentisif di Indonesia yang diatur dan diawasi tata niaganya sehingga segala kebijakan yang menyangkut importasi & <i>trade off</i> kedua komoditas tersebut perlu dikaji terlebih dahulu mengingat Pemerintah saat ini memiliki program swasembada gula dan beras.</p>	
4.	14-21 Januari 2016 Berlin, Jerman	Menghadiri <i>Global Forum for Food and Agriculture</i> (GFFA) dan Kunjungan ke Beberapa Pusat Penelitian Pertanian	Menteri Pertanian	<p>Hasil Kegiatan:</p> <p>1. Forum GFFA 2016 dengan tema utama "<i>How to feed our cities? Agriculture and rural areas in an era of urbanization</i>" dihadiri oleh Para Menteri Pertanian dari 65 Negara. Pertemuan tersebut membahas permasalahan pokok dunia saat ini, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan global, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan, khususnya masyarakat dunia di wilayah perkotaan.</p> <p>2. Beberapa pemikiran yang</p>	

				<p>mengemuka di dalam forum GFFA 2016 adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Salah satu kunci utama menghadapi permasalahan pangan dunia saat ini adalah pembangunan perdesaan, mengingat peran wilayah perdesaan sebagai sumber produksi pangan. Dalam hal ini, strategi pembangunan global perlu diadaptasi agar dapat diterapkan dalam kerangka pembangunan perdesaan yang bersifat modern, efisien, sustainable dan berbasis kearifan lokal (<i>local wisdom</i>). Selain itu, pengembangan rantai nilai (<i>value chain</i>) komoditas pertanian harus diarahkan untuk merubah struktur kegiatan ekonomi perdesaan agar secara ekologis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan (<i>ecological and socially responsible manner</i>).</p> <p>b. Permasalahan produksi pangan tidak hanya dialami oleh negara yang miskin, tetapi juga negara yang kaya dengan sumber daya alam. Kerjasama internasional perlu didorong untuk mengembangkan teknologi produksi pangan yang efisien dan dapat diadopsi oleh berbagai negara sesuai dengan kondisi sumber daya alamnya.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>c. Pentingnya pendekatan pembangunan pertanian bersifat holistik berbasis modernisasi dan inovasi yang mencakup perubahan kebijakan, pembangunan infrastruktur dan industri hilir, perbaikan rantai pasok, serta pemberdayaan petani dan masyarakat perdesaan. Pada kesempatan ini, kami juga mengemukakan pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan berkelanjutan.</p> <p>3. Forum GFFA 2016 menghasilkan sebuah komunique yang berisi komitmen bersama para Menteri Pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dari sisi kuantitas dan kualitas, serta dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan. Komunique ini juga menggarisbawahi tiga tantangan utama yang perlu segera ditangani, yaitu:</p> <p>a. Pembangunan sektor pertanian yang lebih produktif, menguntungkan, dan berkelanjutan.</p> <p>b. Pembangunan rantai nilai dan rantai pasok komoditas pertanian yang lebih efisien dan handal.</p> <p>c. Pembangunan wilayah perdesaan sebagai tempat yang lebih menarik untuk tempat tinggal dan tempat</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>bekerja.</p> <p>4. Dilakukan juga pertemuan informal dengan wakil menteri pertanian Kazakhstan untuk membahas peran Indonesia dalam <i>Islamic Organization for Food Security (IOFS)</i> yang digagas oleh Kazakhstan, dalam kerangka <i>Organization of Islamic Countries (OIC)</i> yang akan menyelenggarakan pertemuan <i>the 7th Session of the OIC Ministerial Conference on Food Security and Agricultural Development</i> pada tanggal 26-28 April 2016 di Astana, Kazakhstan. Pada kesempatan ini, kami telah menyampaikan apresiasi terhadap gagasan Kazakhstan, serta kesiapan untuk hadir dalam <i>Ministerial Conference</i> di Kazakhstan.</p>	
5.	15 Jan 2015 Pusat KLN	Rapat Koordinasi Pengembagan Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda	Atase Pertanian Belanda di Jakarta	<p>Kedua belah pihak mencapai kesepakatan terhadap beberapa poin penting meliputi:</p> <p>1. Kepentingan Belanda: UU Hortikultura No. 13 Tahun 2010</p> <p>Pencabutan pelarangan impor produk unggas pasca pencabutan status HPAI di Belanda</p> <p>Rencana pembentukan Expert Group Meeting on Fisheries</p> <p>2. Kepentingan Indonesia:</p>	<p>1. Pusat KLN akan mengkoordinasikan seluruh isu teknis dengan instansi terkait yang relevan. Selanjutnya, seluruh perkembangan akan dikomunikasikan dengan pihak Belanda melalui Atase Pertaniannya di Jakarta, begitu pula sebaliknya.</p> <p>2. Seluruh perkembangan kerjasama ini nantinya akan dibahas lebih detail pada WGAF yang rencananya dilaksanakan di Indonesia bulan September 2016.</p>

				<p>Capacity Building (khususnya program scholarship bagi petugas pertanian).</p> <p>Fasilitasi perdagangan komoditas tropis.</p> <p>Investasi di bidang cold chain untuk mengurangi persentase food losses</p>	
6.	21 Januari 2016, Kemendag	Rapat Sub Komite Perdagangan Barang Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pertemuan ke-4 <i>Joint Committee General Review IJEPA</i>	Kemendag Kemenlu, Kemenko Perekonomian, Kemenprin Kementan, Kementerian KP Kemenkeu, Badan POM.	<p>Hasil Pertemuan:</p> <p>Rapat Menyepakati agar Kelompok Perunding Sub Komite Perdagangan Barang dapat segera menindaklanjuti beberapa hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan/koreksi atas tabel korelasi/transposisi yang telah disampaikan oleh Jepang untuk produk 9 digits dari HS 2002 ke HS 2007 dan HS 2007 ke HS 2012. 2. Menyusun <i>priority list</i> atas <i>request</i> produk kategori R dan Q disertai alasan dan data perbandingan tarif bea masuk Jepang untuk negara-negara ASEAN lainnya. 3. Menyusun penjelasan/jawaban atas <i>Japan's Questionnaire</i> terkait <i>Import Regulation on Food</i>. 4. Menyusun <i>Indonesia's Questionnaire</i> terkait <i>Japan's Non Tariff Measures</i> (SPS dan TBT). 	Pusat KLN akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lingkup Kementan terkait kesepakatan dalam pertemuan dimaksud, dan akan menyampaikan kepada pihak Kementerian Perdagangan.

7.	25 – 26 Januari 2016, Bogor	Koordinasi Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra	Direktur Afrika, Kemlu Direktur Kerjasama Teknik, Kemlu Kepala PSEKP Kementan Paraktisi IPB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan membahas rencana penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian yang diperuntukkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan berupa Pilot Project pengembangan komoditas pertanian di negara Mitra. 2. Kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pertemuan untuk penyusunan draft awal adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Akan menghimpun informasi mengenai potensi, kekuatan, peluang dan melakukan assesment negara Afrika yang akan dijadikan objek kajian. • Mengidentifikasi Sumber daya yang dimiliki Indonesia dan negara–negara Afrika • Menghimpun success story program Kementerian Pertanian • Merumuskan Strategi dan Program dalam pelaksanaan setidaknya memiliki 2/3 Program. • Membuat Master Plan (sebagai petunjuk utama) 5 tahun dalam Penyusunan Grand Design Pilot Project Pertanian di Negara Mitra. • Diusulkan 4 Negara yang akan menjadi Pilot Project Pertanian di Negara Mitra yaitu Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia dan Madagaskar 	Rapat Pembahasan Berikutnya untuk penyusunan Grand Design Project Pertanian di Negara Mitra hari Jumat tgl 12 Februari 2016
8.	27 Januari 2016,	Pembahasan Draft Protokol	Barantan,	1. Ekspor manggis RI ke Tiongkok	

	Kementan	Persyaratan Ekspor Manggis ke Tiongkok	Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan	<p>pernah di suspend pihak Tiongkok pada tanggal 8 Februari 2016 dikarenakan terdapat temuan cemaran. Sejak saat itu RI terus berupaya melakukan pendekatan kepada pihak Tiongkok melalui beberapa kunjungan.</p> <p>2. Pada tanggal 31 Januari – 5 Februari 2016 Tim dari kementerian Pertanian yang terdiri dari Dr. Antarjo Dikin dan Ir. Ihsan Nugroho berkunjung ke Tiongkok guna melakukan verifikasi dalam rangka registrasi laboratorium dan pertemuan dengan Pemerintah RRT terkait draft protokol persyaratan ekspor manggis ke Tiongkok.</p> <p>3. Pihak Tiongkok telah mengirimkan draft protokol import manggis kepada pihak RI. Kementan telah mengkaji draft protokol dimaksud.</p> <p>4. Beberapa pasal dalam draft protokol seperti daftar organisme pengganggu yang dilarang pihak Tiongkok harus direvisi dikarenakan organisme pengganggu tersebut sampai saat ini tidak pernah ditemukan pada manggis.</p>	
9.	29 Januari 2016 Kementan	Pertemuan Menteri Pertanian dengan Duta Besar Korea	Menteri Pertanian RI, Dubes Korea Selatan,	<p>Hasil Pertemuan:</p> <p>1. Pemerintah Indonesia mengajak</p>	

		Selatan, Thailand, Vietnam, dan Jepang	Dubes Thailand, Dubes Vietnam, Dubes Jepang	<p>4 negara yaitu Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Jepang, untuk melakukan investasi di sektor pertanian, khususnya sapi, jagung dan gula.</p> <p>2. Pemerintah Indonesia menawarkan lahan untuk dikelola seluas 2 juta ha untuk 4 negara tersebut. Rinciannya terdiri dari 2 juta ha lahan tersebut, 1 juta ha nya akan digunakan untuk <i>live cattle</i> sapi, sedangkan 500 ribu ha akan digunakan untuk produksi jagung dan 500 ribu ha lainnya disediakan untuk gula tebu.</p> <p>3. Kementerian lain yang terlibat dalam proyek ini yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).</p> <p>4. Untuk jagung dan tebu, lahan baru ini akan tersebar di kawasan Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk fasilitas <i>live cattle</i> sapi direncanakan untuk buka di Pulau Buru, NTT, dan di NTB. Di Kalimantan telah ada 350 ribu ha.</p> <p>5. Dari hasil pertemuan dimaksud, ke 4 Duta Besar menunjukkan ketertarikannya.</p>	
--	--	--	---	--	--

KERJA SAMA REGIONAL

1.	8-9 Januari 2016, Wisma Cipayung, Bogor	Rapat Koordinasi KSST TA. 2016	Direktorat Kerjasama Teknik dan Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri; Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional, dan Direktorat Pangan Pertanian, Bappenas; Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara; Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dan Lembang, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, serta perwakilan dari BPPSDMP dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertanian sudah lama mendukung KSST Indonesia. 2. Anggaran KSST untuk Tahun ini tersedia ± 13,075 Miliar, dan anggaran tersebut tidak on-top tetapi dari porsi APBN DIPA Kementerian Pertanian, hal ini menunjukkan Kementerian Pertanian sangat mendukung KSST. 3. Dalam mengimplementasi kegiatan KSST, Kementerian Pertanian didukung oleh para tenaga ahli dan petugas teknis dari berbagai Balai di Kementerian Pertanian (BBIB Singosari, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Lembang, BB Mektan dll) serta unit yang menangani KSST di tingkat Pusat (Biro KLN, BPPSDMP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan). 4. Tujuan dari pertemuan adalah dalam rangka sinkronisasi kegiatan KSST agar dapat terlaksana dengan baik dan dilakukan secara efisien dan efektif. 5. Dari pelaksanaan KSST ada hal-hal yang menjadi <i>leason learned</i> badi Kementerian Pertanian diantaranya seperti proses penerimaan peserta yang kurang terkoordinasi, yang menyebabkan dampak terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan bantuan teknis untuk Myanmar, perlu ada koordinasi kembali mengenai peluang Kementerian Pertanian dalam pemberian bantuan. 2. Terkait dengan Pelatihan yang akan diadakan oleh BPPSDMP untuk negara MSG, Puslatan menunggu data permintaan, spesifikasi bantuan apa yang diperlukan negara-negara tersebut dari Kementerian Luar Negeri. 3. Terkait dengan persiapan <i>High Level Meeting Kyrgyz</i> tanggal 24-26 Januari 2016, BBIB Singosari akan mengundang Biro KLN untuk rapat koordinasi lebih lanjut. 4. Perlu adanya rapat lebih lanjut mengenai rancana pemberian bantuan teknis untuk negara Afrika.
----	---	--------------------------------	---	--	---

				<p>kurang lancarnya kedatangan peserta, sehingga berdampak pada kerugian pembelian tiket pesawat dan sebagainya.</p> <p>6. Selain daripada itu , ada kejadian yang belum terselesaikan kewajibana pembayaran <i>training fee</i> dari Timor Leste, permintaan pelatihan bidang <i>Human Resource Management</i> yang telah dilaksanakan di Indonesia pada bulan Oktober 2015.</p> <p>7. Kepala Biro KLN menyamapaikan mengingat bahwa anggaran utnuk bantuan dalam rangka KSST tersebar di berbagai K/L (Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, KST Kementerian Luar Negeri, dll), pada prinsipnya Kementerian Pertanian tidak berkeberatan, asalakan ada kontrak atau perjanjian khusus terkait pelatihan yang akan dilaksanakan.</p>	
2.	11 Januari 2016, Pusat KLN Kementan	Rapat Persiapan <i>The 12th Session of the Governing Council of the Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA)</i> yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 19 Februari 2016	Perwakilan dari Kemenlu (Sekretariat Ditjen Multilateral, Dit. Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, serta Dit. Perjanjian Ekonomi dan Sosbud), Badan Litbang Pertanian (Sekretariat Badan Litbang, Pusat Litbang Tanaman Pangan, PSEKP), Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan Informasi Publik, dan Biro	<p>1. Perwakilan dari Setditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri, berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia selaku <i>host</i> CAPSA harus melakukan analisa dan pengkajian lebih lanjut tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari program-program CAPSA yang ada. Kementerian Pertanian perlu membuat Kelompok Kerja (Pokja) khusus membuat usulan-usulan program dan membuat kajian tentang program-program</p>	<p>1. Kementan perlu membuat tim kecil untuk membuat usulan program-program yang tentunya bermanfaat untuk Kementerian Pertanian, sebelum kita menyetujui kenaikan kontribusi;</p> <p>2. Atas kesepakatan tersebut, maka Pusat KLN akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 25 Januari 2016 dengan mengundang Unit Eselon I terkait guna membahas program dan kepentingan</p>

			Perencanaan).	CAPSA selama ini; 2. Perwakilan dari Badan Litbang Pertanian juga mengungkapkan bahwa perlu mengundang Direktur CAPSA yang baru, yaitu Masakazu Ichimura dan meminta Beliau untuk memaparkan rencana program dan <i>business plan</i> yang baru;	Indonesia sebagai <i>host country</i>
3.	14 Januari 2016 JICA Indonesia, Senayan	Video Conference Persiapan Pelatihan untuk Palestina	Pusat pelatihan Pertanian, Pusat KLN Kementerian Pertanian	1. Pusat Pelatihan akan merevisi TOR training sesuai hasil diskusi 2. Deadline revisi TOR : 29 Januari 2016 untuk diproses draft Minutes of Meetingnya	Pusat Pelatihan akan segera berkoordinasi dengan BBPP Lembang dan Ketindan untuk penyesuaian TOR
4.	15 Januari 2016, Kemendag	Rapat Persiapan Pertemuan Komite ITRC, tanggal 19 – 22 Januari 2016 di Bangkok	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian (PKLN, Ditjenbun), Kementerian Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Penelitian Karet, Dewan Karet Indonesia dan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO)	1. Diskusi tentang kerjasama antara ITRC dan negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CMLV) akan dituangkan dalam bentuk <i>Ministerial Declaration</i> , dimana setiap negara yang memutuskan untuk bergabung dengan ITRC harus menerapkan instrument yang sama dengan ITRC. Oleh karena itu, dibutuhkan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) apabila ada negara anggota baru dalam ITRC. Sejauh ini, Vietnam telah ada keputusan lisan untuk bergabung. 2. Kendala saat ini, adalah harga karet dunia yang terus menurun. Salah satu indikasi faktor yang mempengaruhi adalah penggunaan <i>basic data</i> dari konsumen untuk konsumen.	Perlu koordinasi antar instansi mengenai konten MoU yang akan diajukan apabila Vietnam jadi bergabung dengan ITRC

				<p>Sehingga, sangat direkomendasikan ITRC untuk mempromosikan statistik database karet yang dapat digunakan bersama sebagai acuan data yang lebih akurat sehingga penentuan harga karet juga lebih baik. Indonesia sendiri telah ditugaskan untuk membuat metoda perhitungan <i>exercise Dinamic Approach</i> milik Indonesia sendiri yang dilakukan oleh GAPKINDO. Namun, pada <i>meeting programme</i> Pertemuan Komite ITRC mendatang belum ada agenda pertemuan <i>statistic committee</i>.</p> <p>3. <i>Special CSMO Meeting</i> akan membahas kemungkinan untuk menerapkan <i>Agreed Export Tonnage Scheme</i> (AETS). Sesuai dengan kesepakatan 3 Menteri dari Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM) pada Desember 2015 di Jakarta tentang pembentukan <i>Regional Rubber Market</i> (RRM) sebagai alat pendeteksi harga karet dan <i>hedging</i> yang efektif. Terkait hal tersebut, Indonesia akan memberikan report kemajuan kesiapan untuk menjalankan AETS yang ditargetkan selesai pada Juli 2016.</p> <p>4. Untuk pelaksanaan AETS kedepannya di tahun 2016, hanya akan berlangsung apabila ada negara lain yang ikut bergabung dalam komite ITRC</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>untuk mendongkrak posisi tawar sebagai produsen karet dunia (saat ini 3 negara dalam posisi ITRC hanya men-supply 65% karet dunia, namun apabila ada 4 negara yang bergabung maka supply dunia meningkat menjadi 85%).</p> <p>5. Agenda <i>Joint Special Meeting on Proze Competition and ITRC Conference on Innovative Product</i> dilaksanakan untuk mendongkrak harga karet melalui inovasi dan teknologi. Atas usulan dari Pusat Penelitian Karet (Puslit Karet), peserta kompetisi harus mewakili lembaga/perusahaan dan tidak diperkenankan berkompetisi perorangan. Selain itu, produk yang diikutsertakan dalam kompetisi sebaiknya memberikan inovasi dengan menyertakan komponen karet di dalamnya.</p>	
5.	18 – 20 Januari 2016 BB Singosari – Malang	Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan KSST 2016	BBIB Singosari , PKLN	<p>1. Pertemuan membahas persiapan pertemuan <i>High Level Meeting</i> (HLM) yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 24-30 Januari 2016. BBIB singosari menyampaikan bahwa hingga saat ini Bappenas belum memberikan kepastian mengenai kesediaan dan kesiapan menerima <i>High Level Offricers</i> dari Kyrgyzstan, dan menurut informasi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan belum memastikan jadwal Dirjen Peternakan yang semula</p>	<p>1. BBIB Singosari akan menyampaikan surat permintaan tanggapan mengenai Agenda HLM tersebut kepada instansi-instansi terkait.</p> <p>2. Pusat KLN perlu berkoordinasi dengan Sesditjen Peternakan mengenai jadwal penerimaan Dirjen PKH untuk <i>Courtesy Call</i>.</p> <p>3. Berdasarkan komunikasi dengan Bappenas via Email, Bappenas akan memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai kesiapan mereka.</p>

				<p>dijadwalkan akan menerima <i>Courtesy Call</i> pada Rangkaian HLM tersebut.</p> <p>2. Dengan adanya kendala-kendala dimaksud, maka BBIB Singosari mengusulkan agar pertemuan tersebut dilaksanakan di Kementerian Pertanian saja, dengan mengundang instansi-instansi terkait. Setelah didiskusikan lebih lanjut, diputuskan bahwa HLM akan dilaksanakan tanggal 25-31 Januari 2016, dengan pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016 (agenda terlampir), dengan harapan Bappenas dapat menerima tamu Kyrgyz.</p>	
6.	18-20 Januari 2016, Sulawesi Utara	Koordinasi Penyusunan Proposal Kerjasama BIMP-EAGA	SKPD Propinsi Sulawesi Utara Balitpalma Pusat KLN	<p>1. Koordinasi dalam rangka penyusunan proposal kerjasama BIMP-EAGA yang diusulkan oleh Propinsi Sulawesi Utara dilakukan di dua tempat, yaitu di Kantor BAPPEDA Propinsi Sulut dan Kantor Sekretariat BIMP-EAGA Propinsi Sulawesi Utara.</p> <p>2. Koordinasi diterima oleh Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Propinsi Sulawesi Utara dan perwakilan SKPD terkait, yaitu: Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Bakorluh, Dinas Kehutanan, Balitpalma, Bank Indonesia, Litbang BAPPEDA, BKP, dan Sekretaris Eksekutif BIMP-EAGA.</p>	<p>1. Pusat KLN perlu segera bersurat secara resmi kepada BAPPEDA Propinsi Sulut untuk melengkapi data yang diperlukan dalam proposal tersebut, khususnya terkait pendanaan.</p> <p>2. Pusat KLN perlu menginformasikan kepada Seknas KESR di Kemenko Perkonomian terkait adanya usulan proyek dimaksud, untuk kemudian disampaikan dalam sidang SPM 2016 BIMP-EAGA yang akan dilaksanakan pada 24-26 Februari 2016, di Davao Filipina.</p>

				<p>3. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memperoleh informasi secara detail terkait identifikasi permasalahan, <i>output</i>, <i>outcome</i>, <i>impact</i>, <i>beneficiaries</i>, <i>activities</i> serta <i>budgeting</i> usulan proyek “<i>Integrated Coconut Production of Small-scale Farmers in BIMP-EAGA</i>”.</p> <p>4. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa BAPPEDA akan mengkoordinir sekaligus menjadi penanggungjawab usulan proyek ini.</p> <p>5. Permasalahan yang dihadapi oleh propinsi Sulawesi Utara dalam mengembangkan potensi kelapa yang dimiliki oleh petani. Saat ini potensi kelapa di Sulawesi Utara sangat besar (278.000 Ha), dimana 95% dimiliki oleh petani namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, permasalahan lain yang muncul adalah belum termanfaatkannya <i>by product</i> dari kelapa yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta kurangnya perhatian para petani terhadap lingkungan.</p> <p>6. Melalui usulan proyek ini, Pemerintah Daerah mengharapkan adanya pengolahan kelapa yang terintegrasi untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan kesejahteraannya.</p> <p>7. Proyek ini akan difokuskan pada 5 (lima) kabupaten di Propinsi Sulut yang merupakan sentra produksi kelapa, yaitu: Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow.</p>	
7.	19 Januari 2016, Pusat KLN Kementan	Rapat Persiapan Strategic Planning Meeting IMT-GT	KKP Ditjenbun Ditjen PKH Kemenko Perekonomian BNPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat membahas tentang <i>up date</i> perkembangan proyek kerjasama WGAAE dan rencana komposisi Delri; 2. Perwakilan dari Kemenko Perekonomian menginformasikan mengenai pelaksanaan <i>BIMP-EAGA and IMT-GT High-Value Agriculture Business Conference and Trade Expo</i> yang akan diselenggarakan pada tanggal 14-16 Oktober 2016 di <i>Four Points-Sheraton Hotel</i>, Makassar, Sulawesi Selatan. 3. Masing-masing negara mendapat pembagian sebanyak 50 <i>stand</i>, sedangkan Indonesia mendapatkan 100 <i>stand</i>. Harga <i>booth/ stand</i> 500USD dengan luas 2x3. <i>Layout</i> dan detail info akan dikirimkan segera ke instansi terkait. 4. Diharapkan peserta yang berpartisipasi tidak hanya UKM tetapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar, 	Pusat KLN, Kementerian Pertanian menunggu masukan tertulis dari instansi/kementerian terkait untuk posisi Delri dan susunan Delri.

				<p>karena akan membuka peluang bagi investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia;</p> <p>5. Dalam kesempatan itu, perwakilan dari KKP mengungkapkan bahwa KKP akan fokus pada harmonisasi sertifikat kesehatan ikan <i>aquatik</i>, <i>free IMS</i> dan akan menjadi <i>Leader</i> untuk isu dimaksud (c.q Direktorat Perikanan Budidaya).</p> <p>6. Selain itu, Badan Karantina Ikan, KKP akan mengajukan usulan proposal mengenai peningkatan kapasitas laboratorium ikan <i>aquatik</i>.</p> <p>7. Dinformasikan juga bahwa KKP akan meninjau kembali proyek yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu <i>Investment on Tuna Fish in West Sumatera</i>, karena tidak ada progres yang berarti dari pihak Pemda Sumatera Barat.</p> <p>8. KKP akan berpartisipasi pada acara Pelaksanaan kegiatan IMT-GT 2016, dan akan mengundang asosiasi bila undangan telah diterima oleh KKP;</p> <p>9. Terkait proyek <i>IMT-GT Network for Animal Production and Biotechnology - Development of Livestock and Beef Cattle, West Sumatera, Indonesia</i>, perwakilan dari Setditjen Peternakan memerlukan informasi lebih lanjut</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dari BPTU Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat;</p> <p>10. Perwakilan dari Dit. PPH Perkebunan, Ditjen Perkebunan memberikan masukan mengenai kerjasama proyek <i>IMT-GT on Oil Palm and Palm Oil</i>.</p> <p>11. Untuk acara workshop sehari yang akan dilaksanakan oleh Thailand, Dit. PPH Perkebunan menunggu undangan dari Thailand, dan akan mengundang GAPKI.</p> <p>12. Diinfokan juga bahwa pada pertemuan <i>SPM IMT-GT</i> di Hotel Alila, Jakarta, Indonesia menunggu <i>TOR</i> dari Thailand terkait <i>workshop</i> tersebut.</p> <p>13. Terkait daerah perbatasan yang bersinggungan dengan kerjasama <i>IMT-GT</i>, perwakilan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI mengungkapkan bahwa secara teknis dan dalam pengembangan kerjasama ekonomi, daerah-daerah perbatasan Sumatera kurang maksimal dalam kerangka kerjasama <i>IMT-GT</i>. BNPP dapat membantu secara <i>administrative</i> dan teknis untuk mendorong Pemda perbatasan sehingga mempercepat perkembangan kerjasama <i>Special Boarder Industrial Zone</i> yaitu Riau, Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Batam, Natuna, Kabupaten Karimun,</p>
--	--	--	--	--

				<p>Kepulauan Anambas.</p> <p>14. KKP sependapat dengan BNPP bahwa KESR berhasil jika daerah-daerah perbatasan dapat lebih aktif dalam kegiatan IMT-GT, karena selama ini daerah yang aktif adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kaltim dalam forum BIMP-EAGA.</p>	
8.	19 – 22 Januari 2016, Bangkok – Thailand	Pertemuan Komite <i>The International Tripartite Rubber Council (ITRC) Special Meeting</i> , 19 – 22 Januari 2016 di Bangkok	Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Kementerian Perdagangan dengan anggota Delri terdiri dari anggota BoD IRCo dari Indonesia yaitu Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian dan Kepala Pusat APBN Kementerian Keuangan serta pejabat dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian dan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo).	<p>1. Penguatan posisi strategi jangka panjang dengan mengajak produsen karet lainnya (Vietnam, Lao PDR, dan Myanmar)</p> <p>Sehubungan dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi negara-negara penghasil karet dunia, ITRC akan melanjutkan negosiasi kerjasama dengan Vietnam untuk membentuk aliansi strategis sebagai pengendali 80% produksi karet alam dunia. Pertemuan dengan Vietnam (pemerintah dan asosiasi perdagangan karet alam) rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016 di Bangkok.</p> <p>2. <i>Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)</i></p> <p>a. AETS adalah kesepakatan untuk mengurangi jumlah yang diekspor oleh masing-masing negara anggota ITRC. Dari hasil pertemuan disepakati 3 opsi pelaksanaan AETS yang rencananya akan dilaksanakan bulan Maret-</p>	<p>Menghadapi situasi rendahnya harga karet dan nasib para pekebun karet dalam negeri, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan peningkatan pemanfaatan karet alam sebagai bahan baku untuk membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan lain-lain. 2. Pemberdayaan petani untuk dapat mengakses ke berbagai kemudahan yang diperlukan (teknologi, permodalan, pasar, kemitraan, sumber benih, dll) sehingga mnurunkan biaya produksi.

				<p>Agustus 2016 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menjalankan AETS ; ii. Menetapkan <i>regional minimum price</i> untuk Karet alam; dan iii. Kombinasi antara AETS dan <i>Regional minimum price</i>. <ul style="list-style-type: none"> b. Ketiga negara belum mencapai kesepakatan terhadap 3 (tiga) opsi rekomendasi implementasi AETS yang ditawarkan oleh <i>Committee on Strategic Market Operation (CMSO)</i>. c. Indonesia, khususnya belum dapat memutuskan apakah AETS dapat dilaksanakan atau tidak karena sulitnya implementasi AETS di level nasional. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini disepakati bahwa implementasi AETS akan difinalisasi pada pertemuan selanjutnya tanggal 28 Januari 2016 di Bangkok. <p>3. <i>Regional Rubber Market (RRM)</i> Pertemuan membahas hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempercepat waktu pembentukan RRM sebelum 1 Juni 2016. Posisi Indonesia masih terkendala pada masalah arbitrase.</p> <p>4. <i>Prize Competition</i> Dalam rangka menjangkau ide dan inovasi penggunaan karet alam, pertemuan menyepakati bahwa syarat utama ide/inovasi tersebut merupakan produk yang dapat menguntungkan industri karet</p>	
--	--	--	--	--	--

				alam; dan teknologi yang digunakan dapat dilakukan oleh industri di negara TIM.	
9.	20 – 22 Januari 2016 Aceh	Koordinasi Perkembangan Kerjasama <i>Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle</i> (IMT-GT) ke Propinsi Aceh, pada tanggal 20-22 Januari 2016	Pusat KLN, Kementerian Pertanian, Badan Investasi dan Promosi Propinsi Aceh dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat	<p>1. Terkait proyek Indonesia – Malaysia yang berjudul “<i>Potential Reverse Investment of Aceh Province</i>”, salah satunya adalah Agro Bazaar, perkembangan saat ini yaitu:</p> <p>a) NAFASindo Aceh Berjaya menyewa 2 (dua) bangunan berlokasi di Punge untuk bazaar agro, yaitu “Agro Bazaar Malaysia”. Dimana toko tersebut menyediakan makanan dan minuman kaleng yang keseluruhannya adalah produk-produk Malaysia;</p> <p>b) Saat kami mengunjungi Agro Bazaar Malaysia, sudah tersedia rak makanan dan minuman, lemari pendingin makanan, lemari es pembeku, dan sarana pendukung lainnya;</p> <p>c) Rencananya Agro Bazaar ini akan segera dibuka, menunggu label impor yang masih belum final untuk beberapa produk makanan tertentu;</p> <p>d) Perijinan label impor tersebut menunggu persetujuan dari Kementerian Perindustrian RI dan Dinas Perindustrian di Aceh;</p> <p>e) PT. Rezi Rizky Utama, mitra lokal NAFASindo telah</p>	<p>1. Badan Investasi dan Promosi Propinsi Aceh akan menginformasikan perkembangan terkini mengenai <i>Agro Bazaar</i> dan proyek “<i>Potential Reverse Investment of Aceh Province</i>”;</p> <p>2. Informasi tersebut di atas sebagai masukan dan posisi Delri pada Pertemuan <i>Strategic Planning Meeting (SPM) IMT-GT 2016</i> akan diselenggarakan di Penang, Malaysia, pada tanggal 3-5 Februari 2016.</p>

				<p>mengurus izin impor tersebut, dan rencananya pada bulan Februari 2016, perwakilan dari PT. Rezi Rizky Utama akan berkunjung ke Malaysia untuk memulai impor produk makanan dan minuman dimaksud.</p> <p>2. Kepala Dinas, Prof. Dr. Abu Bakar Karim, MS pada dasarnya mendukung kegiatan Kerjasama IMT-GT. Namun, banyak terdapat kendala-kendala, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurangnya sosialisasi tentang adanya kerjasama IMT-GT kepada para petani, walaupun beberapa kali pernah ada pertemuan IMT-GT; - infrastruktur kurang maksimal; - kurangnya pembinaan kepada SDM, misal petani dan tenaga kerja lain (misalnya diperlukannya penyuluh); - dalam kerangka kerjasama masih belum terakomodir kebutuhan dan manfaatnya bagi Indonesia; - tidak ada implikasi dan tindak lanjut yang signifikan 	
10.	21-23 Januari 2016 Lampung	Monitoring Kelompok Kerja PISAGro	Kementerian Pertanian, PT. Great Giant Pineapple (GGP)	<p>1. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor perkembangan kerjasama PISAGro dengan petani mitra binaan, khususnya yang berada di daerah Lampung.</p> <p>2. Kunjungan dilakukan ke Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan pepaya Bangkok kuning dan jambu</p>	Biro KLN, Kementan diharapkan dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait agar program-program PISAGro lebih bersinergi.

				<p>bangkok dengan luas areal tanam sekitar 60 ha.</p> <p>3. Harga beli yang ditawarkan oleh pihak perusahaan sebesar Rp. 1800/kg untuk pepaya Bangkok kuning, sementara untuk jambu Bangkok sebesar Rp. 2000/kg. Harga beli ini telah ditetapkan oleh perusahaan dan petani dalam kontrak diawal, namun kontrak tersebut tetap bersifat fleksibel dengan melihat kondisi pasar.</p> <p>4. Saat ini kemitraan PT. GGP dengan petani dirasakan saling menguntungkan, dikarenakan pihak petani terjamin hasil panen mereka akan dibeli oleh perusahaan, sementara kebutuhan perusahaan akan pepaya dan jambu dapat terpenuhi dengan kapasitas sebanyak 200 ton/tahun, namun jika lebih dari itu dikhawatirkan akan <i>over supply</i>.</p>	
11.	22 Januari 2016, Kemenko Perekonomian	Rapat Persiapan <i>The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching 2016</i>	Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub-Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga	<p>1. Pada awal rapat, pemimpin menginformasikan bahwa SPM IMT-GT 2016 akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Februari 2016 di Penang, Malaysia. Adapun rangkaian kegiatan dimaksud antara lain: <i>National Secretariat Meeting Working Group Meeting (break-out session)</i> <i>Senior Official Retreat 12th</i></p>	Pusat Kerja Sama Luar Negeri diminta untuk segera mempersiapkan bahan terkait perkembangan proyek yang ada didalam WGAAE, serta menyampaikan susunan delri kepada Seknas.

			<p>Kerja, Kementerian Luar Negeri, BKPM, perwakilan Pemerintah Daerah Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Aceh, Pusat Kerja Sama KLN Kementerian Pertanian.</p>	<p><i>CIMT Advisory Committee Meeting</i></p> <p>2. Terdapat 4 (empat) agenda utama dari pertemuan Strategic Planning Meeting IMT-GT 2016 ini, yaitu: <i>Comprehensive Review Process Formulation of New Implementation Blueprint 2017-2021</i> <i>Review IB 2012-2016</i> <i>Potential New Project for New IB 2017-2021</i></p> <p>3. Terkait dengan <i>Comprehensive Review Process</i>, para Kepala Negara menyepakati untuk dilakukan review secara <i>comprehensive</i> terhadap IMT-GT supaya bisa tetap bersaing dan sesuai dengan perkembangan dan sejalan dengan ASEAN 2025.</p> <p>4. Dalam rangka penyusunan IB yang baru yaitu IB 2017-2021, akan diadakan <i>National Workshop</i> sebanyak 2 kali pada bulan Maret 2016 di Kepri (tentative), guna memperoleh masukan dari setiap daerah IMT-GT dan K/L terkait mengenai hal-hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh daerah melalui forum kerjasama IMT-GT. Selain itu, pada bulan Mei 2016, akan dilaksanakan Rakornas IMT-GT di Bengkulu.</p> <p>5. Sebagaimana diketahui, bahwa</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>dari 90 proyek yang terdapat didalam IB 2012-2016, hanya 16 proyek yang sampai saat ini sudah terselesaikan. Berdasarkan itu, untuk penyusunan IB 2017-2021, program-program yang akan dimasukkan harus sesuai dengan program Pemerintah Nasional dan Pemerintah daerah, serta dimasukkan ke dalam anggaran baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar bisa berjalan dengan baik.</p> <p>6. Masing-masing <i>Focal Point Working Group</i> diharapkan dapat mendiskusikan Proyek baru yang potensial yang dapat dimasukkan dalam <i>New IB 2017-2021</i>, dengan acuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejalan dengan kepentingan nasional maupun daerah dan masuk dalam RPJMN maupun RPJMD – NAWACITA. - Mempunyai dukungan dana yang jelas terukur dan dapat dicapai selama periode 5 tahun - Mempunyai dampak yang tinggi terhadap masyarakat memperoleh dukungan dari sektor swasta baik secara langsung maupun melalui mekanisme PPP - Diutamakan untuk proyek yang sudah selesai pre-feasibility study dengan sumber pendanaan yang jelas bersifat lintas batas dan melibatkan paling tidak 2 (dua)
--	--	--	--	--

				<p>negara anggota atau yang mendukung konektivitas sub regional</p> <p>7. Perwakilan dari Pemerintah Daerah Aceh wilayah Sabang menyampaikan bahwa terdapat potensi Kakao di daerah Pidie, yang memungkinkan untuk diangkat dalam forum kerjasama IMT-GT.</p>	
12.	25 Januari 2016, Kemendag	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Komite ITRC tanggal 19 – 22 Januari 2016 di Bangkok, Thailand	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Penelitian Karet, Dewan Karet Indonesia dan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) dan Kementerian Pertanian (PKLN dan Dit. Tanaman Tahunan, Ditjenbun)	<p>1. Terkait rencana implementasi AETS tahun 2016, disepakati bahwa Indonesia siap melaksanakan implementasi pembatasan ekspor dengan persyaratan :</p> <p>i. Vietnam harus ikut melaksanakan pembahasan ekspor meskipun posisinya hanya sebagai <i>strategic partner</i>. Hal ini dibutuhkan untuk mendongkrak posisi tawar sebagai produsen karet dunia. Apabila Vietnam tidak turut berpartisipasi dalam pembatasan ekspor, diharapkan Malaysia mereduksi lagi jumlah ekspornya karena salah satu penyerap produksi Vietnam adalah Malaysia.</p> <p>ii. Implementasi pembatasan ekspor (AETS) harus terkait dengan pelaksanaan <i>Supply Management Scheme</i> (SMS) untuk merasionalisasi kebutuhan supply karet alam dalam jangka panjang.</p> <p>2. Indonesia harus segera</p>	<p>1. Dibutuhkannya koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Perdagangan dengan instansi terkait lainnya mengenai kesiapan Indonesia mengimplementasikan pembatasan ekspor karet alam</p> <p>2. Dibutuhkannya harmonisasi peraturan arbitrase, <i>exchange rules and regulations</i> untuk peluncuran pasar karet</p> <p>3. Dibutuhkannya masukan terhadap <i>draft</i> MoU Kerjasama ITRC dengan Vietnam sebagai <i>Strategic Partner</i></p> <p>4. Diperlukannya masukan kriteria pelaksanaan dan sosialisasi penyelenggaraan kompetisi berhadiah inovasi</p>

				<p>menyiapkan regulasi domestik agar setiap kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan komite ITRC dapat diimplementasikan secara nasional. Saat ini, yang dipandang sangat penting terkait akan disepakatinya pembatasan ekspor adalah dibutuhkan undang-undang perdagangan dan mereview posisi pemerintah dalam meregulasi harga minimum.</p> <p>3. GAPKINDO meminta ada penguatan klausul agar memiliki hak instrumental dalam ijin pemberian ekspor (TPP) untuk mengatur anggotanya agar lebih disiplin apabila kedepannya pembatasan ekspor telah dilaksanakan, terutama dengan kondisi sekarang dimana pelaksanaan AETS dimaksudkan agar menahan harga karet alam agar tidak lebih jatuh ke posisi yang lebih rendah.</p> <p>4. Pabrik <i>crumb rubber</i> di Indonesia membutuhkan proses yang sangat panjang untuk mereduksi bokar kotor menjadi bersih, oleh sebab itu harga produksi menjadi tinggi sementara harga jual produk rendah. Diharapkan dari Kementerian Pertanian melakukan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada petani bokar agar menghasilkan bokar bersih sesuai dengan Permentan No. 38 tahun 2008.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>5. Untuk kedepannya, diharapkan pihak Kementerian Pertanian dapat memberikan rekomendasi dalam pendirian pabrik <i>crumb rubber</i> baru, karena saat ini dikhawatirkan adanya pembukaan terhadap investasi pabrik <i>crumb rubber</i> tidak sesuai dengan kapasitas produksi di kabupaten tersebut.</p> <p>6. Untuk pelaksanaan pasar karet fisik yang dalam pembahasan sebelumnya di Bangkok akan dilaksanakan Maret 2016, Indonesia sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk meluncurkan pasar fisik sesuai jadwal.</p> <p>7. Dalam pelaksanaan kompetisi berhadiah, disepakati di pertemuan ini bahwa kompetisi harus menggunakan inovasi untuk memperluas penggunaan karet alam sebagai substitusi material yang secara signifikan dapat meningkatkan nilai tambah dan penggunaan jumlah karet alam.</p>	
13.	25 Januari 2016, Pusat KLN Kementan	Rapat Lanjutan Persiapan <i>The 12th Session of the Governing Council of the Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA)</i> yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tanggal 19 Februari 2016	perwakilan dari Kementerian Pertanian yaitu Sekretariat Badan Litbang, Pusat Litbang Tanaman Pangan, Setditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Karantina Pertanian Biro Hukum dan Informasi Publik, dan	<p>1. Rapat membahas tentang keinginan CAPSA agar Indonesia menambah kontribusi dari US\$ 79,662 menjadi US\$ 190,000;</p> <p>2. Peserta rapat yang hadir berpendapat bahwa jika Indonesia menyetujui kenaikan kontribusi, maka Pemri c.q Kementerian Pertanian harus</p>	<p>1. Terkait susunan Delri pada Pertemuan GC CAPSA ke-12 mendatang, badan Litbang menyampaikan delri yang akan hadir yaitu: Kepala Puslitbang Pertanian dan Kepala Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Badan Litbang Pertanian;</p>

			Biro Perencanaan.	<p>melihat dan me-<i>review</i> manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia dan sebagai tuan rumah CAPSA. Untuk itu, perlu dibuat kajian tentang analisis <i>cost and benefit</i> CAPSA;</p> <p>3. Sebaiknya, Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus anggota CAPSA dapat memanfaatkan secara maksimal program-program CAPSA</p>	<p>2. Pusat KLN akan menyurati Eselon I terkait dan mengadakan rapat koordinasi lanjutan, guna membahas program dan kepentingan Indonesia sebagai <i>host country</i>.</p>
14.	25 Januari 2016, Pusat KLN Kementan	Rapat persiapan pertemuan <i>The 7th OIC Ministerial Conference on Food Security and Agricultural Development</i> dan <i>The Inaugural General Assembly of Islamic Organization for Food Security (IOFS)</i> telah dilaksanakan pada tanggal	Dit. Sosbud OINB Kemlu, Dit. APEC dan OIL Kemdag, serta instansi teknis terkait lingkup Kementan (BKP, Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, serta Badan Litbang Pertanian).	<p>1. Kemlu menyampaikan bahwa Indonesia saat ini belum menjadi <i>observer</i> dan belum menandatangani statuta IOFS tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan, diantaranya: (i) Mekanisme kerjasama ketahanan pangan untuk membuat stok gandum belum menjadi prioritas Indonesia, (ii) adanya konsekuensi finansial berupa iuran tahunan anggota, (iii) posisi geografis Kazakhstan di Asia Tengah yang cukup jauh sehingga menyulitkan Indonesia untuk mengakses <i>food reserve</i> tersebut, sehingga biaya logistik akan lebih besar daripada harga komoditas tersebut.</p> <p>2. Kemlu menyarankan agar Mentan RI atau Delegasi RI untuk hanya hadir pada PTM OKI ke-7 saja, dan tidak hadir pada Pertemuan Inaugural Assembly of IOFS. Terkait dengan status Indonesia yang belum menjadi <i>observer</i> maupun anggota, Kemlu mengingatkan agar sebaiknya Indonesia tidak</p>	<p>1. PKLN sebagai <i>focal point</i> forum OIC akan melakukan kajian dan <i>cost benefit analysis</i> keanggotaan Indonesia pada IOFS dengan melibatkan instansi teknis terkait.</p> <p>2. Kementan diminta untuk mengundang Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI (PPIH), Ditjen Multilateral, Kemlu pada rapat pembahasan selanjutnya</p> <p>3. Dit. APEC dan OIL Kemendag akan memberikan data terkait <i>trade balance</i> Indonesia dengan negara-negara anggota OIC sebagai bahan masukan kajian tersebut.</p>

				<p>memberikan masukan apapun terkait IOFS ini, karena dikhawatirkan pernyataan Indonesia dalam forum tersebut akan mengikat dikemudian hari.</p> <p>3. Peserta rapat setuju jika Indonesia mengamati lebih lanjut perkembangan IOFS ini sebelum memutuskan untuk bergabung dengan IOFS mengingat belum terlihatnya manfaat yang dirasakan oleh Indonesia dari IOFS ini.</p> <p>4. Forum ini bisa juga dimanfaatkan untuk peluang kerjasama perdagangan komoditas pertanian unggulan Indonesia antara lain kopi, karet, kakao, pala, lada, dll.</p>	
15.	26 Januari 2016, Pusat KLN Kementan	Pembahasan kepastian pelaksanaan <i>High Level Meeting Kyrgyz</i>	PKLN, Bappenas, BBIB Singosari, Perbibitan PKH, Sesditjen PKH	<p>1. Sesditjen Peternakan menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 Dirjen Peternakan berhalangan untuk menghadiri HLM dikarenakan ada acara di NTT.</p> <p>2. Bappenas menyampaikan bahwa dikarenakan pejabat yang berkepenting tidak ada pada tanggal-tanggal yang diusulkan sebelumnya, maka Bappenas melalui surat tanggal 21 Januari 2016 mengusulkan agar pertemuan diundur di minggu kedua Februari 2016.</p> <p>3. Setelah berdiskusi bersama, telah ditetapkan bahwa pertemuan HLM akan dilaksanakan pada tanggal 14-19 Februari 2016, diawali di Jakarta</p>	<p>1. Sesditjen Peternakan akan berkoordinasi secara internal untuk menentukan <i>host</i> untuk HLM di Kementerian Pertanian.</p> <p>2. Bappenas akan menyiapkan <i>Courtesy call</i> tanggal 15 Februari beserta undangan.</p> <p>3. Kementerian Pertanian akan menyiapkan <i>draft RoD</i> untuk disampaikan kepada pihak terkait serta <i>stakeholder</i>.</p>

				<p>dengan <i>Courtesy Call</i> di Bappenas dengan Tim Korrdinasi Nasional KSST dan pihak swasta pada tanggal 15 Februari 2016 dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk membahas progress <i>Reverse Linkage</i> sampai dengan saat ini serta kerjasama kedepannya, dan kemungkinan adanya penandatanganan <i>Record of discussion (ROD)</i>. Setelah pertemuan di Jakarta dilanjutkan dengan <i>visits</i> di Malang antara lain ke BBIB Singosari, dinas peternakan Jawa Timur dan diakhiri pada tanggal 18 Februari 2016 dengan <i>Launching Ekspor Semen Beku</i>.</p> <p>4. Berdasarkan hasil diskusi, belum dapat ditentukan siapa yang akan menjadi <i>Host</i> untuk pertemuan HLM di Kementerian Pertanian dikarenakan masih perlu melihat jadwal dari Dirjen Peternakan dan untuk alternative Sekjen Pertanian.</p> <p>5. Untuk isi dari RoD akan dibahas pada pertemuan di Kyrgyzstan pada saat pengiriman Tenaga Ahli Inseminasi Buatan pada tanggal 4-12 Februari 2016.</p>	
16.	27 Januari 2016 Kemenlu	Rapat persiapan CEAPAD, 2-3 Februari 2016 di Jepang	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat	Pembahasan mengenai bantuan- bantuan yang memungkinkan untuk	Kementerian Pertanian akan berkonsultasi dengan Ditjen

			Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata	ditawarkan kepada negara Palestina dari masing-masing instansi.	Peternakan mengenai bantuan pelatihan inseminasi buatan untuk palestina.
17.	27-29 Januari 2016 Denpasar-Bali	Koordinasi Peningkatan Kerjasama ASEAN	Pusat KLN, SIMANTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peninjauan terkait Sosialisasi FAF 2016-2025; 2. Melakukan kunjungan lapang yang telah menerapkan sistem pertanian terintegrasi 	Kelompok Safitik Karya Darma Bakti menjadi acuan guna melaksanakan program integrasi yang digagas Gapoktan Tumang Sejahtera, yang disebut sebagai integrasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan menerapkan sistem integrasi tiga strata ini, tidak ada satu komponen pun yang terbuang (<i>zero waste</i>), dan dari sistem tiga strata ini, optimalisasi hasil dapat ditingkatkan dan kegiatan ekonomi masyarakat ditopang oleh tiga kekuatan pilar pendapatan. Sehingga proses kesejahteraan dapat terealisasi di masyarakat.
18.	28 Januari 2016 Pusat KLN Kementan	Pertemuan Direktur CAPSA dengan Kepala Pusat KLN	CAPSA Pusat KLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur CAPSA menyampaikan bahwa saat ini CAPSA berada di titik krusial dimana sangat memerlukan bantuan kontribusi yang signifikan dari negara anggota GC 2. Disampaikan juga bahwa dalam pertimbangan ESCAP untuk cost-effective CAPSA, beberapa hal yang akan ditempuh untuk CAPSA, yaitu: (i) melanjutkan keberadaan CAPSA di Bogor; (ii) merger dengan Centre ESCAP lainnya; (iii) memusatkan kegiatannya di Bangkok 3. Kepala Pusat KLN menyampaikan bahwa Indonesia sangat menyadari bahwa aspek finansial merupakan aspek yang 	Pusat KLN akan segera berkoordinasi dengan Balitbang untuk menyiapkan posisi Delri

				<p>paling penting dalam kelangsungan suatu organisasi khususnya dalam pencapaian program-program CAPSA.</p> <p>4. Disampaikan juga bahwa terdapat kemungkinan untuk meningkatkan kontribusi namun Kemlu memerlukan data pendukung yang menguatkan bahwa program CAPSA benar-benar menyentuh petani kecil di Indonesia.</p> <p>5. 3 hal yang disepakati: (i) bahwa Indonesia akan membuat justifikasi dalam rangka meningkatkan kontribusi; (ii) mendukung CAPSA untuk mengingatkan kepada negara anggota GC lainnya untuk pula meningkatkan kontribusinya kepada CAPSA, (iii) kontribusi in-kind melalui Badan Litbang akan dikaji lebih lanjut.</p>	
19.	29 Januari 2016 Kementerian Sekretariat Negara	Rapat persiapan <i>advance team</i> ke Timor Leste (Inseminasi Buatan)	Sekretariat Negara Bappenas Kemlu Pusat KLN BBIB Singosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Inseminasi Buatan : 1 Maret 2016 (tentative) 2. Pengadaan barang : Minggu I 3. Setneg akan menyusun rundown dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian Timor Leste 	BBIB Singosari akan berkoordinasi dengan vendor dan melakukan persiapan
KERJASAMA MULTILATARAL					
1.	5 Januari 2016 Kementan	Rapat Persiapan bahan <i>Workshop Regional Initiative to Support the Zero Hunger Challenge in Asia and the Pacific</i>	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala FAOR, Program Manager FAO, pejabat lingkup eselon satu teknis Kementerian Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan <i>Zero Hunger Challenge</i> ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia menuju <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>, khususnya goal nomor 2, yaitu peniadaan kelaparan (<i>End of hunger</i>) pada tahun 2030 dan sejalan pula dengan agenda 	Akan dijadwalkan launching Zero Hunger di Indonesia

				<p>Nawa Cita 2015-2019, serta sebagai investasi cerdas dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif.</p> <p>2. Upaya Pencanaan Gerakan ZHC sangat tepat dan strategis untuk dilakukan sebagai basis untuk menjadikan ZHC sebagai payung dalam menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan dan mensinergikan berbagai kebijakan, strategi dan program guna mempercepat pencapaian peniadaan kelaparan.</p> <p>3. Pencanaan ZHC tentunya tidak hanya bersifat seremonial, namun menjadi legitimasi terhadap keseriusan pemerintah dalam upaya pengentasan kelaparan. Untuk itu, perencanaan ZHC diharapkan dilakukan oleh Presiden RI, selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, disertai dengan pelaksanaan workshop yang melibatkan seluruh K/L terkait diantaranya Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, KKP, KLHK, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, sebagai langkah penyusunan roadmap rencana aksi pencapaian target peniadaan kelaparan.</p> <p>4. Komitmen nasional untuk mendukung <i>Zero Hunger</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>Challenge</i> melalui pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran; hal ini melalui inventarisasi kegiatan yang telah ada di K/L terkait (<i>Link and Match</i>) dan penajaman program dan kegiatan di tiap K/L terkait, sehingga keterpaduan program/kegiatan pada masing-masing K/L dapat saling bersinergi dan selaras dengan pencapaian tujuan kelima pilar <i>Zero Hunger Challenge</i> tersebut.</p> <p>5. Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Nasional <i>Zero Hunger Challenge</i> dan dukungan dari mitra internasional. Adapun penyusunan Rencana Aksi dapat menempatkan mitra kerja internasional sebagai <i>Adviser</i> sehingga Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menyusun kebijakan/program.</p>	
2.	7 Januari 2016 Kemenlu	Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri	Para diplomat perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional, seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah, wartawan dalam dan luar negeri,	<p>1. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, menyampaikan pernyataan pers tahunan (PPTM) di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (7/1). Dalam pernyataannya, Menlu Retno menggarisbawahi tantangan dan capaian diplomasi Indonesia selama tahun 2015.</p> <p>2. Acara tersebut dihadiri pula oleh tiga orang mantan menteri luar negeri, yaitu Marty Natalegawa, Hassan Wirajuda, dan Alwi Shihab, juga menarik perhatian</p>	

				tersendiri pada PPTM tahun ini.	
				<p>3. Pada PPTM 2016 disampaikan pula penghargaan Adam Malik yang diberikan bagi insan pers yang dinilai memiliki peran signifikan dalam pemberitaan maupun diseminasi informasi serta hasil capaian diplomasi Indonesia. Kelima penerima Adam Malik Awards tersebut adalah Harian Kompas (media cetak), detik.com (media online), MetroTV (televisi), RRI (radio), dan Marwan Muhammad Zubaidi (jurnalis).</p> <p>4. Setelah menyampaikan pidatonya, Menlu Retno, didampingi Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir, dan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Esti Andayani, juga meresmikan tampilan baru website Kemlu 2.0 yang diluncurkan bersamaan dengan Kemlu Apps yang dapat diunduh secara luas oleh pengguna android melalui Play Store.</p>	
3.	8 Januari 2016 Badan Litbang Pertanian, Kementan	Rapat Pembahasan Persiapan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016	Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat KLN Kemtan, Sesba BKP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jateng, dan Sesba Litbang Pertanian	<p>1. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Badan Litbang Pertanian</p> <p>2. Disepakati bahwa daerah yang akan dipilih sebagai lokasi peringatan Hari Puncak HPS ke-36 Tahun 2016 adalah lahan marjinal yang akan dikembangkan melalui inovasi</p>	Penyampaian konsep Surat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah perihal permintaan waktu audiensi untuk tanggal 21 Januari 2016 di kantor Gubernur Jateng.

				<p>teknologi pertanian. Badan Litbang Pertanian mengusulkan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) di Desa Jakenan Pati, Jawa Tengah, sebagai lokasi Acara Puncak karena disekitarnya terdapat lahan marginal yaitu; Desa Lundo, Tegal Arum, Sidomukti dan Mojoluhur dengan hamparan lebih dari 100 Ha</p> <p>3. Tentatif Tema yang akan diangkat adalah “Inovasi Pemanfaatan Lahan Marginal untuk Kesejahteraan Petani”</p> <p>4. Pada rapat persiapan sebelumnya Bulan Desember 2015 di Pusat KLN Kementan, pihak BKP Provinsi Jawa Tengah sempat mengusulkan Kabupaten Boyolali sebagai lokasi HPS dengan pertimbangan akses yang mudah ditempuh baik dari Semarang, Solo maupun kota besar lainnya di Provinsi Jawa Tengah, serta lahan pertanian yang luas. Khusus di Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, terdapat lahan kering yang hanya dapat dipanen padi 1 kali/tahun, diharapkan dengan masuknya inovasi pertanian dapat membantu meningkatkan produksi padi serta meningkatkan kesejahteraan petani</p> <p>5. Badan Litbang pertanian mengusulkan agar Bapak</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala Badan Litbang Pertanian dapat melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Jateng perihal penunjukan lokasi acara puncak HPS ke-36 Tahun 2016</p> <p>6. Rencana audiensi dengan Bapak Gubernur adalah hari Kamis tanggal 21 Januari 2016.</p>	
4.	8 Januari 2016/ Sekretariat Badan Litbang, Kementan	Rapat Persiapan Pertemuan The 7th International Hybrid Rice Symposium	IRRI, Badan Litbang, BB Padi, PKLN	<p>Pertemuan The 7th International Hybrid Rice Symposium direncanakan akan dilaksanakan di Bali dengan jumlah peserta 500 orang, terdiri dari lembaga penelitian dan perusahaan benih padi hibrida. Waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari dengan aktivitas meliputi workshop dan field visit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi mekanisme pendanaan kegiatan The 7th International Hybrid Rice Symposium pada pihak IRRI 2. Penentuan lokasi penanaman padi hibrida di Bali yang direncanakan akan dipanen pada saat acara simposium
5.	19 Januari 2016 Hotel Aryaduta-Jakarta	Seminar Nasional Perkembangan Implementasi UN <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> di Indonesia	<p>Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian LH dan Kehutanan, Bappenas, Mabes Polri, Komnasham, Kementerian Dalam Negeri, Pemda DKI, KPAI, PT. Jasa Marga, PT. PLN, LSM, dan Akademisi Ditjen PPHP (Bidang Bilateral), wakil dari Biro Umum (Setjen), wakil dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat ini dunia usaha memiliki peran yang besar di dunia karenanya dalam membahas isu bisnis dan HAM diperlukan keikutsertaan dunia usaha. 2. Kebijakan pemerintah Indonesia lebih lambat dalam merespon perkembangan bisnis tambang di Kalimantan Timur. 3. Pembahasan UN Guiding Principles di Tingkat ASEAN pada tahap penyusunan ASEAN Economic Community (1967 – 2015) 4. Pembahasan UN Guiding principles di tingkat nasional pada tahap penyusunan Rencana Aksi 	<p>Kemlu akan memfasilitasi sosialisasi RANs yang sudah dilakukan oleh Instansi pemerintah.</p>

				<p>Nasional (RANs) meskipun saat ini baru Komnasham dan Kemenkum HAM yang menyusun RANs.</p> <p>5. Implementasi ketentuan-ketentuan mengenai bisnis dan HAM oleh pelaku usaha di Indonesia baru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan sebagian kecil usaha menengah sedangkan pengusaha UKM belum. Suatu usaha akan berkelanjutan jika memperhatikan HAM</p>	
6.	20 Januari 2016 Puri Gedeh (rumah jabatan Gubernur)	Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah terkait Pembahasan Persiapan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016	Rapat dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, Sekretaris Badan Litbang Pertanian, Kepala Pusat Penelitian Peternakan, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jateng, Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Perwakilan dari Pusat KLN Kemtan, dan jajaran SKPD Daerah,	<p>Rapat dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Badan Litbang Pertanian</p> <p>Disepakati bahwa daerah yang dipilih sebagai lokasi peringatan Hari Puncak HPS ke-36 Tahun 2016 adalah Kabupaten Boyolali sebagai lokasi HPS dengan pertimbangan akses yang mudah ditempuh baik dari Semarang, Solo maupun kota besar lainnya di Provinsi Jawa Tengah, serta lahan pertanian yang luas.</p> <p>Khusus di Desa Salakan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, terdapat lahan kering yang hanya dapat dipanen padi 1 kali/tahun, diharapkan dengan masuknya inovasi pertanian dapat membantu meningkatkan produksi padi serta meningkatkan kesejahteraan petani</p>	Akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Pusat dan Daerah pada Bulan Februari 2016

7.	20 Januari 2016 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	Rapat Finalisasi Penyusunan Draft RPerpes dan Naskah Urgensi dalam rangka Ratifikasi HCA Pendirian Country Office IFAD di Indonesia	Kemenlu, Kemenkumham, Setkab, Setneg, KKP, Kementan, Kemenkeu	Tata bahasa dan RPerpes tentang ratifikasi pendirian kantor perwakilan IFAD di Indonesia terutama pada butir Menimbang, Mengingat dan Menetapkan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.	Kementan dimohon masukan terkait draft Naskah Urgensi
8.	21 Januari 2016 Kemendag	Rapat Pembahasan Komposisi Panelis dalam First Slate terkait Kasus Sengketa DS484	Kemendag, Kemenlu, BSN, Kementan	Kandidat panelis pada <i>First Slate</i> untuk Ketua Panel terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu: Ms. Mary Elizabeth Chelliah (Singapore) dan Mr. Felipe Jaramillo (Kolombia), sedangkan untuk Anggota Panel terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu: Mr. Hamid Ahmad (Pakistan), Mr. Nicolas Imboden (Switzerland), Mr. Marco Molina Tejeda (Guatemala) dan Mr. Jamal Olaimad (Jordan).	Kandidat panelis dari Pakistan lebih berpotensi untuk menjadi Ketua Panel karena negara tersebut menerapkan sistem halal di negaranya
9.	21 Januari 2016 Kemenlu	Rapat Terkait Usulan Pendirian Kantor Regional ICCO	Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kementan, Kemendag, Kemeperind, dan Asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rapat dipimpin oleh Kasubdit Pertanian & Komoditi, Dit. PPIH Kemlu 2 3 (tiga) agenda penting hasil sidang AF yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti menyangkut kepentingan Indonesia dalam organisasi tersebut, yaitu (1) Tanggapan Indonesia terkait usulan pembukaan Kantor Regional ICCO di Indonesia, (2) Tanggapan Indonesia mengenai rencana re-negosiasi International Cocoa Agreement (ICA) 2010, (3) Usulan nama kandidat Executive Director (ED) ICCO dan tenaga ahli bidang kakao dari Indonesia untuk bekerja di sekretariat ICCO 3 Beberapa hal yang disepakati dalam rapat terkait poin-poin tersebut yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingat belum adanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan perwakilan 2 orang petani untuk mengikuti pertemuan <i>World Cocoa Conference (WCC)</i> pada tanggal 22 -25 Mei 2016 di Bavaro Dominika Rep. Usulan nama-nama petani tersebut, diharapkan dapat dikirimkan kembali kepada sekretariat ICCO sebelum tgl 20 Januari 2016. 2. Mengevaluasi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota ICCO khususnya pasca perpindahan HQ ICCO ke Abidjan, dalam periode dua-tiga tahun, Indonesia akan mencermati manfaat perpindahan HQ tersebut bagi Indonesia. 3. Meneruskan informasi mengenai terbukanya lowongan sebagai <i>Executive Director</i> ICCO kepada stakeholder terkait dan segera menyampaikan kembali

				<p>konsensus terkait pendirian Kantor Regional ICCO, maka Indonesia akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan, manfaat dan konsekuensi anggaran yang akan ditanggung Pemri dengan didirikannya Kantor Regional di Indonesia.</p> <p>b. Indonesia akan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan expert di bidang hukum internasional untuk membahas klausul-klausul dalam ICA 2010 sehingga dapat lebih mengakomodir kepentingan Indonesia dalam organisasi tersebut dan menyampaikan kembali kepada ICCO sebelum sidang Council ICCO ke 93 di bulan Mei 2016.</p> <p>c. Kemlu akan berkirim surat kepada institusi terkait mengenai rencana pencalonan kandidat ED ICCO dan tenaga ahli dari Indonesia untuk bertugas di <i>headquarter</i> (HQ) ICCO.</p>	<p>usulan nama-nama tersebut kepada Kemlu sebelum bulan Maret 2016</p>
10.	26 Januari 2016 Pusat KLN Kementan	Rapat Persiapan OECD Committee on Agriculture tanggal 2 – 4 Februari 2016 dan Meeting of the OECD Committee for Agriculture at Ministerial Level tanggal 7 – 8 April 2016	PKLN, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	<p>Hasil dan Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Eselon I teknis terkait menjawab daftar pertanyaan yang disampaikan untuk penerimaan Tim Misi OECD 2. Paparan terkait Pelaksanaan Kegiatan OECD di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Pendampingan Kunjungan Tim Misi OECD yang akan melakukan observasi di PSEKP Bogor 2. Akan dilaksanakan Sosialisasi terkait OECD lingkup Kementerian Pertanian
11.	27 Januari 2016 PSEKP, Bogor	Pertemuan Pendampingan menerima misi OECD	PKLN, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan	Observasi Tim OECD dan Diskusi dengan Peneliti PSEKP	Peningkatan Kerjasama dengan OECD

		Economic Survey of Indonesia 2016	Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		
SUB BAGIAN TU DAN ATANI					
1.	13-14 Januari 2016 BB Biogen Bogor	Finalisasi Laporan Tahunan 2015 PKLN	PKLN Kementan	<p>Pembahasan Finalisasi Laporan Tahunan 2015 Pusat Kerja Sama Luar Negeri membahas kerangka kegiatan yang akan dimasukkan dalam laporan tahunan adalah sebagai :</p> <p>BAB I Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang 2. Visi dan Misi 3. Tujuan 4. Sasaran 5. Struktur organisasi Pusat KLN <p>BAB II Pengembangan Kerjasama Bidang Bilateral</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Bilateral Di Dalam Negeri 2. Menghadiri Sidang / Pertemuan Internasional 3. Courtessy Call Pertemuan Dengan Menteri Pertanian RI 4. Courtessy Call Pertemuan Dengan Sekretaris Jenderal Kementan 5. Penyelenggaraan Workshop/ Seminar/ Sosialisasi 6. Menghadiri Workshop/Seminar /Sosialisasi 7. Diplomatik Tour 8. Pengiriman Tim Ahli ke Madagaskar 9. Penandatanganan MoU 10 Kunjungan Menteri Pertanian dan Sumber Daya Alam negara 	Dari hasil pembahasan tersebut diharapkan kepada penanggung jawab di Bidang Bilateral, Regional dan Multilateral dapat memperbaiki yang belum sesuai Output dan Tindak Lanjut serta melampirkan foto kegiatan dimaksud.

				<p>bagian West Kurdofan Sudan</p> <p>BAB II Pengembangan Kerjasama Bidang Regional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Sidang / Pertemuan Internasional 2. Menghadiri Sidang / Pertemuan Internasional 3. Courtesy Call / Pertemuan Dengan Sekretaris Jenderal 4. Penyelenggaraan Workshop/Seminar/Sosialisasi 5. Menghadiri Workshop/Seminar/Sosialisasi <p>BAB III Pengembangan Kerjasama Bidang Multilateral</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Sidang / Pertemuan Internasional 2. Menghadiri Sidang / Pertemuan Internasional 3. Courtesy Call / Pertemuan Dengan Sekretaris Jenderal 4. Penyelenggaraan Workshop/Seminar/Sosialisasi 5. Menghadiri Workshop/Seminar/Sosialisasi 6. Hari Pangan Sedunia <p>BAB IV Dukungan Ketatausahaan Dalam Pusat KLN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Workshop/Seminar/Sosialisasi 2. Menghadiri Workshop/Seminar/Sosialisasi <p>BAB V Penutup</p>	
2.	12 Januari 2016 Balai Penelitian Peternakan	Rapat Pembahasan Redistribusi Pegawai Eks Ditjen PPHP	Eselon I Lingkup Kementan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perubahan Peta jabatan Dalam SK Unit Eselon I 2. Pendataan SDM ditetapkan 	

				<p>dalam SK Unit Eselon I</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaturan Pembayaran Tunjangan Kinerja dengan SK 4. Penetapan Grade untuk Pegawai Eks Ditjen PPHP minimal harus sama 5. Penurunan Grade dilakukan jika terpaksa tidak ada formasi untuk pegawai tersebut 6. Penetapan pemberian kelas jabatan harus berpatokan pada Permentan No. 66/Permentan/KU 060/12/2015 	
3.	21-23 Januari 2016 Jawa barat	Tindak Lanjut Buku Kerja Sama Kementan Dengan Lembaga Donor	Pusat KLN Dinas Pertanian Tanpa Dinas Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan diterima oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga beserta Staf. 2. Dalam kesempatan tersebut Pusat KLN menyampaikan Buku Dokumentasi Kerjasama Kementerian Pertanian Dengan FAO dan World Bank. 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan memberikan informasi khususnya keberhasilan beberapa program pembangunan di bidang tanaman pangan yang telah banyak mengalami peningkatan di wilayah Jawa Barat. 4. Pusat KLN juga kunjungan ke Dinas Peternakan Propinsi Jabar dan mendapat penjelasan bahwa selama ini telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk FAO, JICA dan 	

				Australia untuk sektor peternakan, selama ini penanganan penyakit PHMS yang ada Propinsi Jabar lebih fokus pada penanganan rabies, flu burung dan brucellosis.	
4.	26-28 Januari 2016 Palangkaraya	Pemanfaatan Peluang Kerjasama Luar Negeri	Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng PKLN Kementan	<p>1. Tim Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian diterima langsung oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Alfian Samosir pada tanggal 27 Januari 2016 walaupun suasana perkantoran di Provinsi Kalimantan Tengah libur Pemilihan Susulan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>2. Pada kesempatan tersebut Tim menanyakan bagaimana manfaat dari Project Managing Consultant (PMC) KOICA Korea Selatan di Kalimantan Tengah dan juga menyampaikan tawaran training pelatihan yang dibiaya oleh negara donor apabila ada pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan yang bisa memanfaatkan dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan antara lain :</p> <p>a. Tawaran pelatihan di Jepang mengenai “<i>Research on Veterinary Technology</i>”</p> <p>b. Tawaran pelatihan di Thailand mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulficiency Economy : Modern Technology for Sustainable Agriculture - Sulficiency Economy : Learning Organic Agriculture by doing 	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat membutuhkan bantuan investasi maupun kerja sama luar negeri dengan negara-negara mitra untuk seluruh sektor dalam membangun daerahnya. Untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memajukan sektor pertanian, dibutuhkan pelatihan di luar negeri sebagai study banding yang dibiayai oleh negara mitra.</p> <p>Diharapkan kepada Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian dapat memberikan informasi dan tawaran pelatihan dan lain-lainnya yang dananya bersumber dari donor, dikarenakan anggaran saat ini tidak memungkinkan untuk mengikuti pelatihan maupun kunjungan ke luar negeri dengan anggaran dari Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Food Security : Utilization Indegeous Food Research for Food Security - Food Security : Post Harvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products - Food Security : Household Food Security for Nutrition Well-being <p>Tim juga menyampaikan 2 (dua) buah yaitu (1) buku Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan World Bank (2) Buku Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dengan Food and Agriculture Organization (FAO).</p> <p>3. Dalam pertemuan tersebut Bapak Alfian Samosir Sekretaris Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas informasi tawaran pelatihan dari Pemerintah Jepang dan Thailand serta Buku Dokumentasi Kerja Sama Kementerian Pertanian dengan World Bank maupun FAO.</p> <p>4. Memang diakui bahwa alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri di seluruh SKPD Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dan 2016 dipotong untuk Pemilihan Kepala Daerah serempak pada tanggal 9 Desember 2015 dan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pemeliharaan Kepala Daerah Susulan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Januari 2016.</p> <p>5. Penjelasan manfaat dari Project Managing Consultant (PMC) KOICA Korea Selatan di Kalimantan Tengah, memang kerjasama ini berlangsung selama tiga tahun, dimulai sejak April 2011 dan berakhir Maret 2014 dengan jumlah dana sebesar 330.000 dolar AS. Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya dilakukan oleh Project Managing Consultant (PMC) KOICA Korea Selatan dengan pengawasan Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI.</p> <p>PMC bantuan dari KOICA tersebut sangat membantu kelompok tani dalam memberikan kursus pelatihan mengenai teknologi pertanian yang lebih maju, sistem pengairan, dan sistem pemasaran Korea Selatan. Diutarakannya, pelatihan itu diberikan kepada aparat pemerintah, aparat desa, dan kelompok tani desa percontohan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pada akhirnya sapat diterapkan di daerah yang bersangkutan.</p> <p>Karena tujuan dari proyek tersebut sangat bermanfaat melakukan studi kelayakan terhadap kesesuaian lahan untuk</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>budidaya tanaman pangan, memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sumberdaya pertanian, melaksanakan pilot percontohan budidaya pertanian tanaman pangan, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, khususnya terhadap petani dan petugas lapangan di bidang budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran," terangnya.</p> <p>Dijelaskannya, ruang lingkup kegiatan proyek tersebut adalah, survey studi kelayakan pemanfaatan sumberdaya pertanian tanaman pangan, training petani di Korea Selatan dan pilot project berupa demplot area percontohan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.</p>	
5.	4 – 29 Januari 2016	Penugasan Pejabat/Pegawai Kementerian Pertanian ke Luar Negeri	Sekretariat Negara RI Kementerian Luar Negeri Kedubes Negara terkait Eselon I Lingkup Kemtan	<p>Telah di proses penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 59 orang yaitu mengikuti workshop sebanyak 13 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 39 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 4 orang, program S2 sebanyak 1 orang, program S3 sebanyak 2 orang.</p>	<p>Berkas/ dokumen perjalanan pejabat/pegawai yang bersangkutan telah dikirim ke Sekretariat Negara RI, untuk memperoleh Surat Keputusan dan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh exit permit serta Kedutaan Besar Negara terkait untuk memperoleh visa.</p>